

MEMBENDUNG ARUS RADIKALISME, SEBERAPA KUAT?

Rumadi Ahmad

Ketua Lakpesdam PBNU

Email: arumadi@hotmail.com



KETIKA NU menggelar Mukhtar ke-33 di Jombang pada 1-3 Agustus 2015 dan mengangkat tema mengenai “Islam Nusantara”, muncul keinginan kuat agar Islam yang berkembang di nusantara diekspor dan menjadi model pengembangan Islam di belahan dunia yang lain. Islam nusantara yang dihayati NU, baik terkait paham politik kebangsaan, dakwah maupun paham sosial kemasyarakatan, dipandang sebagai model keberagaman paling ideal. Paham politik kebangsaan yang tidak mempertentangkan Islam dan nasionalisme, model dakwah yang penuh kearifan dan kasih sayang, serta paham sosial kemasyarakatan yang dilandasi

pola pikir dan pola sikap yang tawasuth, tawazun, tasammuh dan i’tidal, terbukti mampu menjadikan Islam di Indonesia sebagai kekuatan sosial yang teduh. Islam menjadi alat pemersatu bangsa, bukan pemecah belah. Semangat itu kian menggebu melihat kenyataan belahan dunia Islam yang lain, terutama Timur Tengah, terus menerus dilanda konflik yang tak berkesudahan.

Sebagai bagian untuk mendorong upaya itu, pada 9-11 Mei 2016 lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), memprakarsai pertemuan internasional bertajuk *International Summit of the Moderate Islamic Leaders* (ISOMIL). Konferensi yang dihadiri perwakilan

ulama dari 30 negara tersebut menghasilkan 16 poin deklarasi. Inti dari semua poin deklarasi adalah pentingnya agama berperan untuk membangun peradaban dan perdamaian dunia.

Dalam deklarasi itu ditegaskan, NU tidak bermaksud untuk mengeksplor Islam Nusantara ke kawasan lain di dunia, tapi sekadar mengajak komunitas-komunitas Muslim lainnya untuk mengingat kembali keindahan dan kedinamisan yang terbit dari pertemuan sejarah antara semangat dan ajaran-ajaran Islam dengan realitas budaya-budaya lokal di seantero dunia. Peradaban dunia antara lain dihasilkan dari perjumpaan yang damai dan dialogis antara ajaran Islam dengan realitas budaya lokal.

Dalam deklarasi itu juga ditegaskan, selama beberapa dekade ini, sejumlah negara di Timur Tengah mengeksploitasi perbedaan-perbedaan keagamaan dan sejarah permusuhan di antara aliran-aliran yang ada, tanpa mempertimbangkan akibat-akibatnya terhadap kemanusiaan. Eksploitasi perbedaan sektarian digunakan untuk memburu *soft power* (pengaruh opini) dan *hard power* (pengaruh politik, ekonomi serta militer) dan mengeksplor konflik mereka ke seluruh dunia. Propaganda-propaganda sektarian tersebut dengan sengaja memupuk ekstremisme agama dan mendorong penyebaran terorisme ke seluruh dunia. Hal ini telah menyulut munculnya gelombang *islamophobia* di kalangan non muslim.

NU juga menyeru dan mengajak

siapa saja yang memiliki iktikad baik dari semua agama dan kebangsaan untuk bergabung dalam upaya membangun konsensus global untuk tidak mempolitisasi Islam, dan memarjinalkan mereka yang hendak mengeksploitasi Islam sedemikian rupa untuk menyakiti sesama.

Hal tersebut merupakan bagian kecil dari episode kiprah NU dalam mempengaruhi peradaban dan perdamaian dunia. Jauh sebelumnya, NU melalui berbagai jalur dan jaringan berupaya menampilkan wajah Islam yang teduh dan damai ke dunia internasional. Terbentuknya Pengurus NU Cabang Internasional di berbagai Negara antara lain bertujuan untuk melapangkan cita-cita itu.

Konflik politik berbalut agama yang terjadi di Timur Tengah memang mempunyai tempat tersendiri di hati umat Islam Indonesia. Kalau umat Islam Indonesia tidak ikut bergerak ketika terjadi gejolak di Timur Tengah, terutama di Palestina, ada perasaan *ukhuwah Islamiyah*-nya layak dipersoalkan. Orang Islam dengan yang lain itu seperti jasad yang satu. Apabila satu bagian tubuh kita sakit, maka tubuh kita secara keseluruhan akan merasa sakit juga. Begitulah doktrin yang dihayati, sebagaimana dilansir sebuah hadis Rasulullah SAW. Persoalannya, apakah pemihakan itu berlaku mutlak semata-mata karena mereka muslim, ataukah bisa dilakukan pemilahan-pemilahan persoalan.

Hal terakhir ini penting didiskusi-

kan karena banyak masyarakat yang salah dan gagal paham dalam melihat persoalan konflik sosial politik. Tidak sedikit diantara umat Islam Indonesia yang melihat konflik di Timur Tengah sebagai konflik agama, baik antar agama, maupun antar intern antar sekte keagamaan dalam Islam. Cara pandang itulah yang akhirnya mendorong sejumlah kalangan yang berusaha membawa konflik tersebut ke Indonesia. Menyneruaknya konflik sekte keagamaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari persoalan geopolitik yang terjadi di belahan dunia Islam yang lain, terutama Timur Tengah.

Mengapa Timur Tengah? Wilayah ini mempunyai posisi istimewa dengan Indonesia, terutama umat Islam. Di samping karena Timur Tengah, terutama Mekah dan Madinah, merupakan wilayah kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan Islam, wilayah ini juga menjadi pusat orientasi psikologis umat Islam. Di banding dengan wilayah dunia yang lain, umat Islam Indonesia merasa lebih punya kedekatan dengan Timur Tengah. Karena itu, fragmentasi politik yang terjadi di wilayah ini akan ditemukan "foto copy"-nya di Indonesia.

Islam dan Arab memang merupakan dua hal yang berkelindan. Bisa dibedakan tapi sulit dipisahkan. Arab dengan seluruh tradisi dan budayanya merupakan bahan dasar Islam. Namun Islam tidak bisa diidentikkan dengan Arab. Meskipun kajian-kajian yang memilah antara yang Arab dan yang Islam

sudah banyak dilakukan,¹ namun memisahkan dua hal ini bukan hal mudah. Bukan hanya dalam struktur nalar, tapi juga dalam budaya. Hal demikian pada gilirannya membentuk solidaritas—yang dalam Islam disebut *ukhuwah Islamiyah*—dalam berbagai dimensi kehidupan.

Kalau di Timur Tengah, negeri asalnya, konflik yang ada bisa hanya berlatar politik dan perebutan kekuasaan misalnya, namun di Indonesia, konflik tersebut bisa berubah menjadi sangat ideologis, baik ideologi keagamaan maupun ideologi sekte keagamaan. Persoalan konflik sunni dan syiah di Indonesia yang belakangan terus dihembuskan misalnya, punya benang merah dengan kontestasi politik kelompok-kelompok keagamaan ini di Timur Tengah. Meski Islam di Indonesia dikembangkan tokoh-tokoh yang diidentifikasi sunni, namun kelompok syiah juga sudah sejak lama tumbuh di Indonesia.² Dalam sejarah yang panjang itu, di Indonesia tidak pernah ada tradisi konflik sunni dan syiah yang mengerikan seperti terjadi di Sampang Madura. Namun, ketika di

1 Jurnal Taswirul Afkar pernah mengangkat tema ini dalam edisi No. 14 Tahun 2003. Dalam edisi ini, Jurnal Taswirul Afkar dengan cover story Islam Pribumi: Menolak Arabisme Mencari Islam Indonesia

2 Bahkan dalam pendahuluan buku tentang Syiah di nusantara, penulis seperti Abu Bakar Atjeh berspekulasi bahwa Islam mula-mula masuk ke Indonesia adalah Syiah melalui orang-orang Hindu yang sudah masuk Islam. Bahkan sejumlah tokoh yang bergelar "sayid" atau "syarif" yang menjadi raja-raja di nusantara adalah Syiah. Lihat Abu Bakar Atjeh, *Aliran Syi'ah di Nusantara*, (Jakarta: Islamic Research Institute, 1977). Argumentasi ini tentu bisa dibantah, namun hal ini menunjukkan, persoalan Syiah sudah masuk dalam perbincangan sejarah Islam di nusantara.

Timur Tengah persaingan politik antara dua kelompok tersebut semakin menguat, ketegangan itu pun akhirnya merembes ke Indonesia. Demikian juga dengan keberadaan sekte Ahmadiyah yang mulai berkembang di Indonesia sejak 1925, meski ada respon ketidaksukaan dari sejumlah ulama, namun tidak pernah terjadi konflik hingga berakhir pengusiran, pembakaran dan pembunuhan.

Meski demikian, bukan berarti faktor eksternal sebagai satu-satunya penyebab adanya konflik keagamaan di Indonesia. Dalam studi mengenai konflik keagamaan yang dikaitkan dengan bangkitnya kelompok radikal di Indonesia, senantiasa menempatkan adanya transmisi dari Timur Tengah ke Indonesia.³ Ada pula yang mengaitkan dengan ajaran dan sejarah dari agama dan kelompok-kelompok agama itu sendiri yang memang senantiasa memicu konflik. Jadi konflik keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang sudah melekat dalam diri agama itu sendiri. Dalam konteks keagamaan di Indonesia, ada juga teori yang mengaitkan politik keagamaan dengan politik orde baru. Tesis utamanya, pada masa orde baru tampak tidak ada konflik keagamaan karena kuatnya cengkeraman pemerintah orde baru. Ketika cengkeraman itu mengendor, maka konflik membunyah dimana-mana.⁴

Meskipun tidak ada faktor tunggal, namun tidak ada yang menolak bahwa dinamika sosial politik dan konflik keagamaan di negeri lain akan dengan mudah merembes ke Indonesia. Belakangan hal demikian sering disebut persoalan transnasional. Pertanyaannya, sampai batas mana Indonesia mempunyai kekuatan untuk membendung arus dan daya tahan terhadap pengaruh ketegangan dan konflik politik keagamaan transnasional ini? Pertanyaan ini penting untuk didiskusikan, karena membiarkan (umat Islam) Indonesia terlarut dalam arus geopolitik di wilayah lain, bukan tidak mungkin Indonesia juga akan terseret dalam kubangan konflik yang sama. Di sinilah pentingnya memberi daya tangkal kepada masyarakat agar visi keagamaannya tidak diinfiltrasi dan digerogoti oleh pandangan dan sikap keagamaan yang bisa memperbesar rembesan konflik dari luar.

Melihat ketegangan politik di Timur Tengah hanya dari kacamata agama akan terjadi *misleading*. Ada banyak faktor yang menjadi pemicu ketegangan di kawasan Timur Tengah, baik secara internal kawasan, maupun pihak di luar kawasan yang juga berkepentingan. Dua poin utama bisa disebutkan: *Pertama*, posisi strategis kawasan ini yang menjadi penghubung bagi ekonomi, perdagangan, dan pertahanan global tiga benua: Asia, Afrika dan Eropa. *Kedua*, soal keanekaragaman yang memang dimiliki Timur Tengah. Keanekaragaman, terutama yang

3 Di samping riset yang dilakukan M. Imdadun Rahmat, lihat juga Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas Garis Keras di Indonesia*, (Bandung: Teraju, 2002); Lihat juga Bilveer Singh, *The Talibanization of Southeast Asia, Losing the War on Terror to Islamist Extremist*, (London: Praeger Security International, 2009).

4 Asumsi-asumsi teoritik ini bisa dibaca dalam Ashutosh Varshney, Rizal Panggabean dan Muhammad Zulfan

Tadoedin, "Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)", UNFSIR, Juli, 2004.

terkait dengan etnis tidak jarang memicu ketegangan di berbagai wilayah.

Suasana batin atas perasaan ketidakadilan, diskriminasi atau peminggiran kelompok, ketimpangan ekonomi menjadi awal mula perasaan kecewa dengan situasi dan kondisi, dan akumulasinya bisa melahirkan protes, ketegangan dan konflik yang mencari sasaran dan target permusuhan. Dorongan pihak luar juga bisa menguatkan ketegangan, sehingga memperkeruh dan muncul pihak yang mengambil keuntungan dari situasi krisis.

Arab Spring yang terjadi pada akhir 2010 menjadi pintu masuk berbagai pihak melakukan koreksi terhadap kepemimpinan di Timur Tengah. Musim semi Arab itu bergerak dari Tunisia hingga menyebar ke berbagai negara di kawasan Timur Tengah. *Arab Spring* yang ditandai dengan tumbangannya sejumlah rezim otoriter di kawasan Arab sempat memunculkan optimisme baru. Tumbangannya sejumlah rezim otoriter di kawasan ini diimajinasikan akan membawa perkembangan baru ke arah yang lebih demokratis dan damai. Faktanya, meskipun beberapa rezim otoriter berhasil ditumbangkan, namun perdamaian kawasan itu belum juga menjadi kenyataan. Alih-alih perdamaian, para analis politik timur tengah bahkan semakin pesimis konflik kawasan yang rumit ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Di Mesir misalnya, pasca tumbangannya rezim Hosni Mubarak, rakyat Mesir justru terjerumus ke dalam konflik sektarian yang mengancam sendi-

sendi kehidupan bangsa Mesir. Kehidupan beragama, terutama Islam dan Kristen yang selama ini terjaga dengan baik, terkena dampak serius.

Krisis Timur Tengah juga melahirkan berbagai model dan varian yang tidak terduga sebelumnya, yaitu munculnya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syuriah*). ISIS yang menjelma menjadi kekuatan yang menakutkan menambah kerumitan krisis di kawasan ini.

Politik Global Semakin ke Kanan

Di tengah kekacauan politik di kawasan Timur Tengah, dunia dikejutkan dengan dengan munculnya gelombang populisme di Eropa dan Amerika. Gelombang populisme antara lain ditandai dengan semakin menguatnya kekuatan-kekuatan berbasis identitas rasial dan agama yang cenderung intoleran. Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Presiden AS beberapa waktu lalu merupakan salah satu penanda penting gelombang populisme. Meskipun dalam kampanye Donald Trump sangat rasial dan terang-terangan menampakkan ketidaksukaan pada (imigran) muslim, namun justru dia yang paling disukai rakyat AS.

Demikian juga dengan munculnya pemimpin-pemimpin populis-konservatif dari partai sayap kanan di Eropa, seperti Nigel Farage (Ketua Partai Independen Inggris) yang menjadi juru bicara dan aktor penting Brexit (*British Exit*) yang mengampanyekan gerakan anti Eropa yang terlalu longgar terhadap

imigran dan merebut lapangan kerja warga Inggris; Viktor Orban, Perdana Menteri Hongaria yang membangun pagar pembatas untuk mencegah imigran; Geert Wilders, pemimpin Partai Kebebasan Belanda juga semakin populer justru dengan sikapnya yang rasial, anti Islam dan anti imigran. Demikian juga dengan Frauke Petry, pemimpin partai sayap kanan Alternative für Deutschland (AfD) German mendominasi sejumlah pemilu regional dengan mengkampanyekan bahwa para imigran dan mata uang Euro telah menghancurkan solidaritas Eropa. Kalau kampanye ini terus menguat bukan tidak mungkin Jerman sebagai salah kekuatan utama Uni Eropa akan mengambil sikap yang sama dengan Inggris.

Kebangkitan kekuatan politik sayap kanan ini juga mulai merambat ke Indonesia, terutama setelah terjadi gelombang aksi besar di Jakarta yang dikenal dengan aksi 411 dan 212. Aksi yang disulut oleh kebencian terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena dituduh telah menistakan al-Quran itu telah menimbulkan berbagai spekulasi. Salah satu yang paling menonjol adalah munculnya anggapan, organisasi Islam moderat—terutama NU dan Muhammadiyah—semakin kehilangan peran dan digantikan oleh organisasi-organisasi keislaman baru yang karakternya cenderung radikal seperti Front Pembela Islam (FPI).

Indonesianis kenamaan dari Australia, Greg Fealy misalnya menyebutkan,

aksi 411 dan 212 merupakan penanda kemenangan kelompok Islam garis keras karena mereka sebagai pemegang kepemimpinan aksi yang disebut-sebut terbesar dalam sejarah Islam Indonesia. Aksi ini juga ditunjuk sebagai bukti lain dari penguatan konservatisme Islam di Indonesia. Tujuan utama gerakan ini tidak saja memaksa pemerintah dan penegak hukum untuk menuntut dan memenjarakan Ahok, tetapi gerakan ini juga memiliki agenda mengubah konstitusi untuk mewajibkan penerapan syariat Islam, mengusulkan larangan terhadap pemimpin non-Muslim dalam komunitas yang mayoritas Islam, pelaksanaan lebih besar ketentuan syariah, dan pencalonan para pemimpin politik untuk posisi eksekutif yang lebih bersimpati pada tujuan Islamis.⁵ Greg Fealy juga memandang, fenomena ini merupakan kemunduran besar bagi hak politik minoritas dan menimbulkan pertanyaan besar tentang citra diri Indonesia sebagai bangsa yang toleran, menghargai keberagaman serta berkomitmen atas supremasi hukum.

Penilaian ini bisa jadi berlebihan dan tentu masih harus diuji kebenarannya. Apakah hal ini merupakan gejala permanen ataupun hanya gejala sesaat karena adanya isu dan momentum yang

5 Lihat Greg Fealy, "Bigger More Than Ahok: Explaining the 2 December Mass Rally". Tulisan tersebut dapat diakses melalui <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than-ahok-explaining-jakartas-2-december-mass-rally/>. Belakangan tulisan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dapat diakses melalui <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bukan-sekedar-ahok-menjelaskan-aksi-massa-pada-2-desember/>

menggerakkan emosi umat Islam. Meski demikian, kenyataan tersebut menjadi tantangan besar bagi organisasi keagamaan, terutama NU. Jika NU sampai bobol dan tergerus oleh gerakan radikal,

maka benteng gerakan Islam moderat juga terkikis. Dalam konteks inilah, gerakan Islam moderat sangat penting untuk memperkuat diri di tengah situasi yang terus berubah.[]